

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

Permasalahan	Akar Masalah
Perlunya peningkatan penerapan transaksi Non Tunai pada Belanja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</li> <li>2. Belum Optimalnya penerapan Analisa Standar Belanja (ASB)</li> <li>3. Masih terdapat penggunaan akun anggaran yang belum sesuai dengan peruntukannya</li> </ol>
Perlunya peningkatan penerapan Transaksi Non Tunai pada belanja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya fitur pembayaran berbasis elektronik di Bendahara Pengeluaran</li> <li>2. Legalitas bukti transaksi belum sepenuhnya mendukung proses elektronifikasi</li> </ol>
Perlunya peningkatan pengelolaan data pegawai yang berdampak kepada besar nilai gaji PNS belum sepenuhnya sesuai dengan waktu yang seharusnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya ketepatan waktu penerbitan SK dengan tanggal mulai berlakunya</li> </ol>
Perlunya peningkatan pengelolaan barang persediaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan belum dilaksanakan secara tepat waktu</li> </ol>
Perlunya peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pengungkapan dalam Laporan Keuangan masing-masing entitas akuntansi sebagai bahan konsolidasi</li> <li>2. Masih kurangnya pemahaman menyeluruh atas sebuah transaksi</li> </ol>
Belum Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengadaan barang belum bersesuaian dengan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;</li> <li>2. Belum memadainya kapasitas SDM pengurus barang dalam penatausahaan BMD;</li> <li>3. Lemahnya pengendalian pengelolaan BMD Perangkat Daerah;</li> </ol>